

BAB III

GAMBARAN UMUM PLUANG

A. Gambaran Singkat Pluang dan Layanan Saham AS

Bagian ini disusun untuk memberikan gambaran faktual mengenai layanan Saham AS pada aplikasi Pluang. Fokusnya adalah menguraikan bentuk layanan, alur penggunaan, pihak yang terlibat, serta dokumen dan bahan hukum yang menjadi dasar operasionalnya. Karena penelitian ini menilai praktik layanan Saham AS melalui perspektif hukum ekonomi *syariah* pada bab berikutnya, maka BAB III ditempatkan sebagai pemetaan fakta. Dengan pemetaan yang jelas, analisis pada bab setelahnya dapat berjalan lebih presisi, terutama ketika harus membedakan antara kepemilikan saham secara langsung dengan paparan nilai ekonomi yang bersifat kontraktual.

Dalam komunikasi publiknya, Pluang menyatakan menyediakan akses ke Saham AS, termasuk fitur perdagangan yang dapat berlangsung sepanjang 24 jam untuk saham tertentu. Pada uraian yang sama, Pluang juga menegaskan bahwa penyediaan akses tersebut difasilitasi oleh PT PG Berjangka dalam perannya sebagai perantara pada ekosistem derivatif keuangan dengan aset dasar berupa efek. Pluang juga menyebut bahwa transaksi dicatat pada Bursa Berjangka Jakarta atau *Jakarta Futures Exchange* (JFX) dan diselesaikan melalui PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).⁹⁹

⁹⁹ "Pluang US Stocks - Invest in Apple, Tesla & Google | Pluang," diakses 22 Desember 2025, <https://pluang.com/en/produk/pluang-us-stocks>. Lihat juga Pluang, "Keamanan: Mengutamakan Keamanan Investasi Anda," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/keamanan>.

Pernyataan mengenai pencatatan transaksi pada JFX dan penyelesaian melalui KBI penting dicatat sejak awal. Hal ini menempatkan layanan Saham AS Pluang ke dalam konteks penyelenggaraan perdagangan berjangka di Indonesia, termasuk mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian. Pada saat yang sama, terdapat indikasi bahwa instrumen yang ditawarkan dapat dipahami sebagai derivatif dengan aset dasar berupa saham atau indeks saham. Konsekuensi klasifikasi ini akan berpengaruh pada cara membaca status kepemilikan, aliran dana, serta sifat hak dan kewajiban pengguna.¹⁰⁰

Pada tingkat pengalaman pengguna, layanan Saham AS diposisikan sebagai produk yang dapat diakses melalui aplikasi. Pengguna memilih saham, menentukan jumlah pembelian, memilih jenis perintah, lalu mengeksekusi transaksi. Pluang menyiapkan materi bantuan yang menjelaskan cara pembelian dengan jenis perintah tertentu, misalnya *limit order*. Dari materi bantuan tersebut dapat ditarik gambaran bahwa aplikasi menyediakan lapisan antarmuka yang mengikat tindakan pengguna, sementara eksekusi dan pencatatan transaksi melibatkan lembaga lain sesuai kerangka regulasi.¹⁰¹

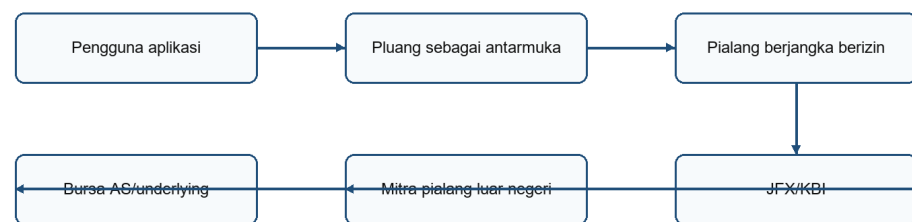
Untuk kepentingan penelitian ini, layanan Saham AS pada Pluang perlu dibaca dalam dua lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan antarmuka, yakni fitur pada aplikasi yang dilihat pengguna, termasuk halaman aset, halaman order, dompet saldo, dan riwayat transaksi. Lapisan kedua adalah lapisan infrastruktur

¹⁰⁰ Pluang, "Keamanan: Mengutamakan Keamanan Investasi Anda," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/keamanan>.

¹⁰¹ "Cara Membeli Saham AS di Aplikasi Pluang | Scribe," diakses 20 Januari 2026, https://scribehov.com/viewer/Cara_Membeli_Saham_AS_di_Aplikasi_Pluang_XjeA00ywQkCpVYSIIIRS1-Q.

dan kepatuhan, yakni pialang berizin, bursa, lembaga kliring, serta mekanisme penyaluran amanat yang menghubungkan kegiatan pengguna dengan pasar luar negeri. Pemisahan lapisan ini memudahkan peneliti dalam memilah fakta yang bersumber dari tampilan aplikasi dan fakta yang bersumber dari ketentuan hukum.¹⁰²

Skema Ringkas Posisi Pluang dan Produk Saham AS



Gambar 3.1. Skema Ringkas Posisi Pluang dan Produk Saham AS dalam Aplikasi

Sebagai pengantar konseptual, istilah Saham AS pada platform digital di Indonesia sering kali tidak selalu berarti kepemilikan langsung atas saham yang tercatat atas nama pengguna pada kustodian di Amerika Serikat. Beberapa platform menawarkan akses dalam bentuk kontrak yang meniru pergerakan harga aset dasar. Dalam literatur pasar keuangan global, bentuk paparan harga semacam ini lazim ditemukan pada produk *contract for difference* atau CFD. Otoritas jasa

¹⁰² PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

keuangan di berbagai negara menempatkan CFD sebagai produk kompleks yang mengandung risiko tinggi, khususnya ketika memakai *leverage*

Dalam kaitan dengan pecahan saham, penting dicatat bahwa konsep kepemilikan kurang dari satu lembar saham dikenal luas dalam praktik pasar modal, khususnya melalui layanan *fractional shares*

B. Pihak-Pihak yang Terlibat dan Relasi Fungsional

Penggambaran pihak yang terlibat diperlukan agar hubungan hukum dan aliran tanggung jawab dapat dipetakan secara sistematis. Dalam layanan Saham AS Pluang, terdapat pihak yang tampak langsung di hadapan pengguna, dan terdapat pihak yang bekerja di belakang layar sebagai penyelenggara perdagangan berjangka, kliring, serta penyalur amanat ke bursa luar negeri. Pemetaan ini juga menolong peneliti untuk mengidentifikasi pada titik mana suatu klausul berlaku, dan pihak mana yang memiliki kewenangan terhadap peristiwa tertentu seperti pembatasan transaksi atau likuidasi posisi.

Pertama, pengguna berada pada posisi sebagai nasabah yang melakukan transaksi melalui rekening yang dikelola oleh pialang. Pada konteks perdagangan berjangka, undang-undang mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang melakukan transaksi kontrak melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka. Definisi ini berguna untuk membedakan posisi pengguna dari anggota bursa atau pedagang yang bertransaksi untuk kepentingan sendiri.¹⁰³

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 1 angka 8.

Kedua, Pluang berada pada posisi sebagai penyelenggara aplikasi yang menyediakan antarmuka transaksi dan informasi kepada pengguna. Dalam komunikasi publiknya, Pluang menyebut bahwa aplikasi dikelola dan dikembangkan oleh PT Bumi Santosa Cemerlang. Dalam praktik layanan multi-aset, fungsi aplikasi dapat mencakup pemrosesan instruksi pengguna, penyajian harga, penyajian biaya, penyajian dokumen, serta pengelolaan kanal bantuan. Namun, fungsi aplikasi tidak selalu identik dengan fungsi pialang. Karena itu, pada penelitian ini, istilah Pluang perlu dibaca sebagai ekosistem layanan yang mencakup entitas penyedia aplikasi dan mitra berizin sesuai produk.¹⁰⁴

Ketiga, PT PG Berjangka berada pada posisi sebagai pihak berizin yang memfasilitasi layanan derivatif keuangan dengan aset dasar berupa efek. Pluang menuliskan bahwa Saham AS, ETF, serta produk lain pada kategori yang sama difasilitasi oleh PT PG Berjangka. Dari sisi struktur pasar, PT PG Berjangka berperan sebagai perantara yang mengeksekusi atau memfasilitasi transaksi, dengan konsekuensi bahwa relasi kontraktual yang relevan untuk transaksi dapat diarahkan pada pialang tersebut.¹⁰⁵

Keempat, Bursa Berjangka Jakarta (JFX) disebut sebagai tempat pencatatan transaksi. Dalam model perdagangan berjangka Indonesia, bursa berjangka menjalankan fungsi penyelenggaraan perdagangan dan menyediakan

¹⁰⁴ PT Bumi Santosa Cemerlang, "Syarat dan Ketentuan Pluang," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/bsc-terms>.

¹⁰⁵ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>. Lihat juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "Profil Pialang Berjangka: PT PG Berjangka, Izin Usaha Nomor 16/BAPPEBTI/SI/02/2014," diakses 20 Januari 2026, https://bappebti.go.id/pialang_berjangka/detail/927.

sistem untuk pencatatan transaksi. Di sisi lain, lembaga kliring menjalankan fungsi kliring dan penjaminan penyelesaian. Pluang menyatakan transaksi dicatat di JFX dan diselesaikan melalui KBI. Pernyataan ini menjadi titik masuk untuk menghubungkan praktik aplikasi dengan sistem bursa dan kliring domestik.¹⁰⁶

Kelima, KBI sebagai lembaga kliring juga memiliki peran strategis dalam perluasan akses pasar. KBI menjelaskan adanya kerja sama PALN yang melibatkan JFX dan pihak pialang luar negeri yang terhubung ke bursa di Amerika Serikat. Informasi semacam ini membantu menggambarkan bahwa rantai penyaluran amanat dapat melibatkan pialang luar negeri, dan bahwa kegiatan domestik bisa terhubung ke pasar global melalui infrastruktur yang dirancang khusus.¹⁰⁷

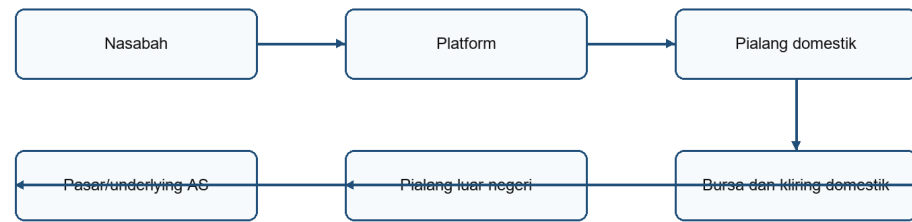
Keenam, pialang luar negeri dan bursa luar negeri dapat muncul sebagai bagian dari skema penyaluran amanat. Dalam kerangka PALN, peraturan menyatakan bahwa pialang yang menyalurkan amanat wajib bekerja sama dengan pialang luar negeri yang menjadi anggota lembaga kliring luar negeri. Karena itu, hubungan fungsional tidak berhenti pada bursa domestik, melainkan berlanjut sampai pada titik eksekusi atau pencatatan di luar negeri sesuai daftar yang ditetapkan regulator.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Pluang, "Keamanan: Mengutamakan Keamanan Investasi Anda," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/keamanan>. Bandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 78-79.

¹⁰⁷ Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX), "Apa itu Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN)?," diakses 20 Januari 2026, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-penyaluran-amanat-luar-negeri-paln>.

¹⁰⁸ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, Pasal 2 dan Pasal 3.

Peta Pihak dan Relasi Fungsional



Gambar 3.2. Peta Pihak dan Relasi Fungsional Layanan Saham AS
Pluang

C. Kerangka Regulasi: Perdagangan Berjangka, PALN, dan Derivatif Keuangan

Kerangka regulasi terbaru perlu dibaca bersama POJK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek. Regulasi ini memperjelas posisi derivatif keuangan berbasis efek dalam pengawasan sektor jasa keuangan dan menjadi dasar penting untuk menilai batas antara akses investasi, kontrak derivatif, kewajiban keterbukaan informasi, serta perlindungan pengguna ritel.¹⁰⁹

Kerangka regulasi menjadi bahan hukum utama yang menjelaskan mengapa layanan Saham AS pada aplikasi dapat diselenggarakan melalui skema perdagangan berjangka. Pada tingkat undang-undang, pengaturan perdagangan berjangka komoditi menekankan adanya transaksi kontrak berjangka atau kontrak

¹⁰⁹ "Siaran Pers: Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK," diakses 22 Desember 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/BAST-PALN.aspx>.

derivatif lain yang diselesaikan kemudian. Model ini menempatkan konsep penarikan *margin* sebagai ciri penting. Dengan begitu, ketika layanan Saham AS menawarkan opsi *leverage*, *layanan tersebut bekerja dalam kerangka kontrak derivatif pada rezim perdagangan berjangka, bukan dalam kerangka perdagangan efek sebagaimana transaksi saham domestik di bursa efek*.¹¹⁰

Selain undang-undang, pengaturan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi juga diatur pada tingkat peraturan pemerintah. Peraturan ini mengurai definisi pihak, mekanisme kliring, dana kompensasi, serta ketentuan mengenai penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri. Pada konteks tesis ini, ketentuan mengenai PALN relevan karena menjembatani transaksi domestik dengan pasar luar negeri melalui sistem bursa berjangka dalam negeri. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa penyaluran amanat hanya dapat dilakukan oleh pialang yang memperoleh persetujuan, dan hanya ke bursa serta kontrak yang daftarnya ditetapkan regulator.¹¹¹

Pada tingkat teknis, Bappebti menerbitkan peraturan yang lebih operasional terkait PALN. Dalam peraturan tersebut ditegaskan beberapa hal kunci. Pertama, hanya pialang yang menjadi anggota lembaga kliring dan memiliki persetujuan yang boleh menyalurkan amanat. Kedua, bursa dalam negeri bertugas menyediakan sistem yang mampu menyalurkan amanat ke bursa luar negeri melalui kerja sama dengan pialang luar negeri. Ketiga, pialang wajib menggunakan sistem penyaluran yang terhubung *online* dengan lembaga kliring

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1.

¹¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 78-79.

dalam negeri. Bagi penelitian ini, ketentuan teknis ini membantu menjelaskan alasan keterlibatan JFX dan KBI dalam layanan Saham AS yang diarahkan ke bursa luar negeri.¹¹²

Perkembangan penting lain adalah pengalihan pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek kepada OJK. OJK menerbitkan peraturan mengenai derivatif keuangan dengan aset dasar efek, dan menjelaskan bahwa amanat pengawasan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Peraturan OJK yang diterbitkan kemudian memberikan definisi dan ruang lingkup pihak perantara pedagang derivatif keuangan, termasuk kemungkinan melibatkan pialang berjangka yang memenuhi ketentuan.¹¹³

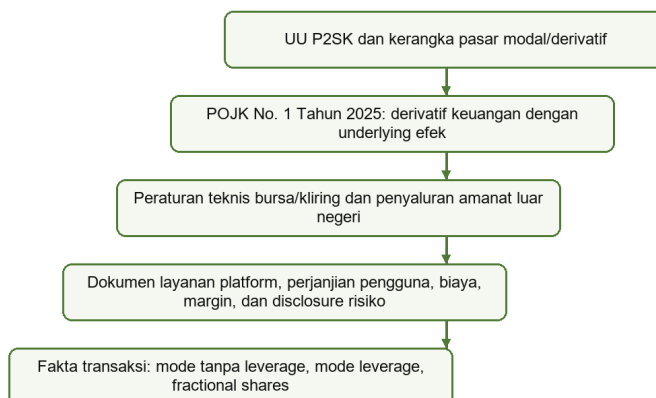
Undang-Undang P2SK, selain menata ulang pengawasan pada sejumlah sektor, juga menjadi rujukan ketika menjelaskan masa transisi kewenangan pengawasan derivatif keuangan. Karena itu, penelitian ini perlu menempatkan pembahasan Pluang dan PT PG Berjangka pada konteks masa transisi aturan. Pada satu sisi, konsep PALN dan infrastruktur bursa berjangka berada pada regulasi perdagangan berjangka. Pada sisi lain, derivatif dengan aset dasar berupa

¹¹² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, Pasal 1 sampai Pasal 3.

¹¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan, Pasal 2-3. Lihat juga "Siaran Pers: Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK," diakses 22 Desember 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/BAST-PALN.aspx>.

efek berada pada pengawasan OJK. Pemetaan ini penting agar pembacaan terhadap izin dan kewenangan pengawasan tidak tercampur.¹¹⁴

Hierarki Regulasi Layanan Saham AS melalui PALN



Gambar 3.3. Hierarki Kerangka Regulasi Layanan Saham AS melalui Skema PALN

D. Dokumen Internal dan Tahap Pra-Transaksi pada Skema PALN

Bahan hukum penelitian ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Pada praktik layanan digital, dokumen internal yang disetujui pengguna juga merupakan bahan penting. Dokumen ini memuat klausul hak dan kewajiban, batasan tanggung jawab, mekanisme biaya, serta ketentuan risiko. Karena pengguna melakukan persetujuan dalam bentuk elektronik, dokumen internal berfungsi sebagai jembatan antara norma umum regulasi dan implementasi konkrit pada aplikasi.¹¹⁵

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1).

¹¹⁵ PT Bumi Santosa Cemerlang, "Syarat dan Ketentuan Pluang," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/bsc-terms>. Lihat juga PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US

Dalam pusat bantuan, Pluang menyediakan artikel tanya jawab yang menjelaskan karakter layanan Saham AS. Pada salah satu artikelnya, Pluang menyebut bahwa transaksi Saham AS dilakukan dengan kontrak *back-to-back terhadap saham acuan, sehingga setiap posisi pengguna dinyatakan memiliki padanan aset pada mitra pialang luar negeri*.¹¹⁶

Dokumen internal yang lazim ditemui dalam layanan semacam ini biasanya mencakup syarat dan ketentuan penggunaan, pernyataan risiko, ketentuan biaya, kebijakan privasi, serta dokumen khusus produk tertentu seperti ketentuan dompet *USD* atau dompet *USD Margin*. Walaupun sebagian dokumen tersebut tidak selalu dipublikasikan di satu halaman terbuka, materi bantuan Pluang dapat diposisikan sebagai petunjuk isi dokumen. Oleh sebab itu, inventaris bahan hukum pada penelitian ini memasukkan materi bantuan sebagai bahan hukum sekunder untuk membaca praktik, sedangkan dokumen peraturan dan dokumen kontraktual tetap menjadi bahan primer.¹¹⁷

Tahap pra-transaksi pada aplikasi umumnya dimulai dari registrasi dan verifikasi identitas. Setelah itu, pengguna akan melakukan persetujuan dokumen digital. Pada tahap berikutnya, pengguna melakukan pengisian saldo atau memilih dompet yang relevan. Pluang juga mengenakan dompet khusus untuk transaksi

Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹¹⁶ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

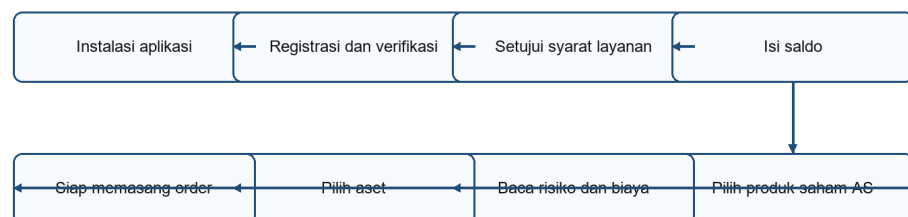
¹¹⁷ PT Bumi Santosa Cemerlang, "Syarat dan Ketentuan Pluang," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/bsc-terms>.

Saham AS dengan *leverage*, yakni *USD Margin*. Penjelasan ini menandakan bahwa produk dengan *leverage*¹¹⁸

Tabel 3.1. Matriks Dokumen Internal Terkait Layanan Saham AS di Pluang

Dokumen/Sumber	Informasi yang Dicari	Relevansi Analisis Syariah	Status Verifikasi
Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi	Relasi pengguna, platform, pialang, dan batas tanggung jawab	Menentukan akad dasar: wakalah bil ujah, ijarah, atau relasi kontraktual lain	Dicocokkan dengan versi dokumen terbaru
Peraturan dan Ketentuan Transaksi US PALN	Alur penyaluran amanat, pencatatan, kliring, dan penyelesaian transaksi	Menentukan keberadaan underlying, qabdh hukmi, serta posisi pialang	Bahan hukum primer platform
Ketentuan Perdagangan/biaya Pluang	Komisi, biaya leverage harian, pajak dividen, margin call, likuidasi	Menguji potensi riba, gharar operasional, dan transparansi ujah	Didukung arsip/tanggal akses
Materi bantuan layanan Saham AS	Istilah fitur, dividen, mode transaksi, dan cara order	Memperjelas pemahaman pengguna dan risiko tadlis/disclosure	Data pendukung

Alur Pra-Transaksi sampai Siap Melakukan Order



¹¹⁸ "Cara Membeli Saham AS di Aplikasi Pluang | Scribe," diakses 20 Januari 2026, https://scribehow.com/viewer/Cara_Membeli_Saham_AS_di_Aplikasi_Pluang_XjeA00ywQkCpVYSIIIRS1-Q.

Gambar 3.4. Alur Pra-Transaksi dari Instalasi Aplikasi sampai Siap Melakukan Order

Pada tahap pra-transaksi, materi bantuan juga menyinggung aspek keamanan dan legalitas. Walaupun istilah aman perlu dibaca secara hati-hati, materi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan terkait dengan PT PG Berjangka dan pencatatan melalui JFX serta KBI. Bagi penelitian ini, klaim tersebut akan digunakan sebagai petunjuk untuk menelusuri izin dan kedudukan para pihak melalui sumber regulasi yang lebih otoritatif.¹¹⁹

E. Mekanisme Transaksi Saham AS melalui PALN pada Pluang

Mekanisme transaksi pada aplikasi dapat dijelaskan secara bertahap. Pengguna memilih aset, menentukan jenis perintah, memasukkan nominal, lalu mengeksekusi. Pada kondisi normal, transaksi menghasilkan posisi yang terlihat pada portofolio. Dalam konteks layanan Saham AS, Pluang menyediakan penjelasan langkah-langkah pembelian, termasuk pembelian melalui *limit order*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki kemampuan menetapkan harga target. Namun, keberhasilan eksekusi tetap bergantung pada kondisi pasar dan ketentuan sistem.¹²⁰

Selain mekanisme perdagangan reguler, Pluang memperkenalkan fitur perdagangan 24 jam untuk saham tertentu. Dalam materi bantuan, Pluang menjelaskan bahwa saham yang dapat ditransaksikan melalui fitur ini ditandai

¹¹⁹ Pluang, "Keamanan: Mengutamakan Keamanan Investasi Anda," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/keamanan>.

¹²⁰ "Cara Membeli Saham AS Di Aplikasi Pluang | Scribe," diakses 20 Januari 2026, https://scribehov.com/viewer/Cara_Membeli_Saham_AS_di_Aplikasi_Pluang_XjeA00ywQkCpVYSlIRS1-Q.

dengan simbol tertentu. Materi bantuan juga menjelaskan pembatasan jenis perintah, misalnya masa berlaku *good till canceled* hanya dapat digunakan pada jam perdagangan reguler. Informasi ini memperlihatkan bahwa terdapat beberapa rejim sesi perdagangan pada aplikasi. Bagi penelitian ini, perbedaan sesi dapat mempengaruhi cara membaca harga, jenis risiko, serta batasan yang dialami pengguna.¹²¹

Pada halaman produk resmi, Pluang menyebut bahwa akses Saham AS disediakan melalui PT PG Berjangka, dan seluruh transaksi dicatat pada Jakarta Futures Exchange (JFX) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Pluang juga menyebut penyaluran langsung ke bursa internasional NASDAQ dan NYSE. Keterangan ini menegaskan bahwa layanan ditempatkan dalam rantai bursa dan kliring domestik sebelum terhubung ke pasar luar negeri. Dari sisi pengguna, informasi tersebut biasanya tampil sebagai keterangan legalitas dan sebagai ringkasan arsitektur transaksi.¹²²

Pluang juga menjelaskan pada artikel biaya bahwa harga Saham AS dan ETF di aplikasi mengacu pada harga bursa NASDAQ dan NYSE, dan pada periode tertentu Pluang menyatakan transaksi tidak dikenakan *spread*, sehingga

¹²¹ "Pluang US Stocks - Invest in Apple, Tesla & Google | Pluang," diakses 22 Desember 2025, <https://pluang.com/en/produk/pluang-us-stocks>.

¹²² "Pluang US Stocks - Invest in Apple, Tesla & Google | Pluang," diakses 22 Desember 2025, <https://pluang.com/en/produk/pluang-us-stocks>. Lihat juga Pluang, "Keamanan: Mengutamakan Keamanan Investasi Anda," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/keamanan>.

*komponen biaya yang tersisa adalah komisi transaksi serta biaya lain yang diumumkan pada halaman biaya aplikasi.*¹²³

Pada halaman FAQ tertentu, Pluang menyebut istilah kontrak *back-to-back* untuk menegaskan bahwa setiap order pengguna diteruskan dan dilindungi nilai secara satu lawan satu ke pasar acuan.¹²⁴

Mekanisme penyaluran amanat pada skema PALN, secara normatif, mengharuskan penggunaan sistem yang disediakan bursa berjangka dalam negeri dan terhubung dengan lembaga kliring. Norma ini tidak menjelaskan rinci alur tombol pada aplikasi, namun menjelaskan kerangka teknis yang harus dipenuhi penyedia layanan. Dengan kerangka ini, penggunaan aplikasi dapat dipahami sebagai tahap input, sedangkan sistem bursa dan kliring domestik menjadi tahap pencatatan dan penjaminan, lalu tahap selanjutnya adalah penyaluran ke pialang luar negeri dan bursa luar negeri sesuai kerja sama.¹²⁵

KBI dan JFX juga mengumumkan kerja sama pengembangan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk mendukung akses investor Indonesia ke bursa Amerika, termasuk melalui kerja sama dengan Tickrs Financial Singapore. Bagi penelitian ini, informasi tersebut mendukung gambaran bahwa terdapat rantai penyaluran amanat yang melibatkan pihak luar negeri. Walaupun penelitian ini tidak memeriksa isi kontrak antar lembaga, penyebutan pihak luar negeri yang

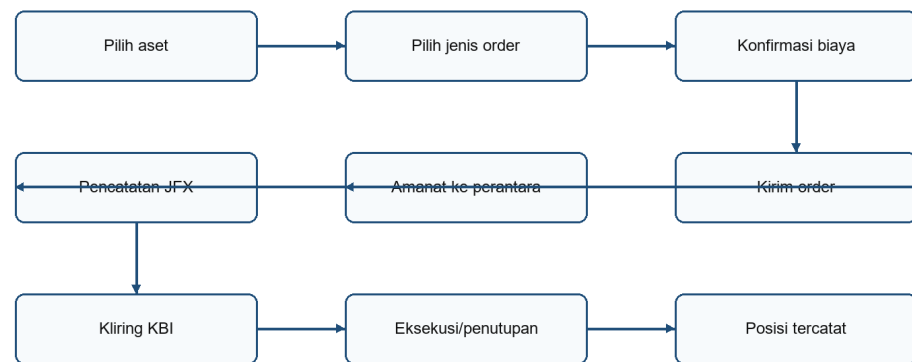
¹²³ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹²⁴ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹²⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, Pasal 2. Lihat juga Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX), "Apa itu Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN)?," diakses 20 Januari 2026, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-penyalaran-amanat-luar-negeri-paln>.

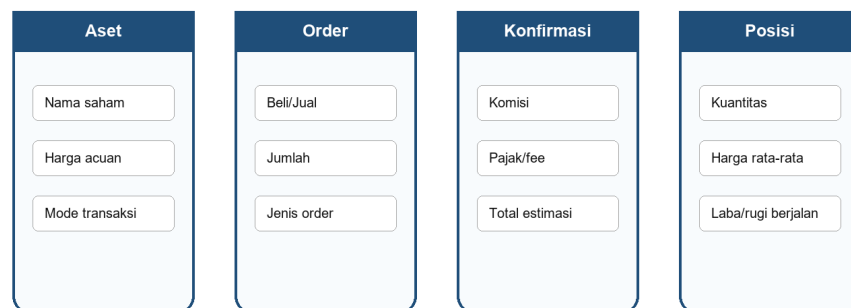
spesifik memperlihatkan bahwa jalur PALN dapat dioperasionalkan melalui kerja sama yang terdokumentasi.¹²⁶

Alur End-to-End Transaksi Saham AS



Gambar 3.5. Alur End-to-End Transaksi Saham AS dari Order sampai Posisi Tercatat

Ilustrasi Elemen Informasi pada Layar Order dan Posisi



Gambar 3.6. Contoh Tampilan Layar Order dan Detail Posisi

Pada tahap pascatransaksi, terdapat beberapa peristiwa yang perlu dicatat sebagai potensi kondisi khusus. Pertama, perubahan harga dapat menghasilkan

¹²⁶ Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX), "Apa itu Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN)?," diakses 20 Januari 2026, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-penyaluran-amanat-luar-negeri-paln>.

laba rugi berjalan. Kedua, ketika terdapat aksi korporasi seperti pembagian dividen, pengguna dapat menerima dividen sesuai ketentuan. Ketiga, pada produk yang menggunakan *leverage*, perubahan harga dapat memicu *margin call* atau likuidasi paksa.

F. Mekanisme Keuangan: Saldo, Ekuitas, *Margin*, dan Likuidasi Paksa

Mekanisme keuangan pada layanan Saham AS dapat dipahami dengan melihat struktur dompet dan istilah yang digunakan aplikasi. Untuk transaksi tanpa *leverage*, pengguna pada umumnya menggunakan saldo USD atau saldo yang dikonversi. Untuk transaksi dengan *leverage*, Pluang memperkenalkan USD *Margin* sebagai dompet khusus. Pemisahan dompet ini menunjukkan bahwa pembiayaan transaksi dengan *leverage*¹²⁷

Dalam materi bantuan, Pluang menjelaskan bahwa *margin call* adalah situasi ketika ekuitas berada pada ambang tertentu terhadap *margin* yang dipakai. Setelah pengguna terkena *margin call*, pengguna diminta menambah dana agar ekuitas kembali berada di atas ambang minimum; apabila tidak dipenuhi, sistem menutup posisi secara otomatis.¹²⁸

Pluang juga memiliki artikel khusus yang menjelaskan pengertian *margin call* pada saham AS *leverage*. Artikel tersebut menegaskan bahwa *margin call* merupakan peringatan yang muncul ketika ekuitas pengguna turun mendekati batas minimum *margin* yang dipersyaratkan, dan apabila peringatan itu tidak

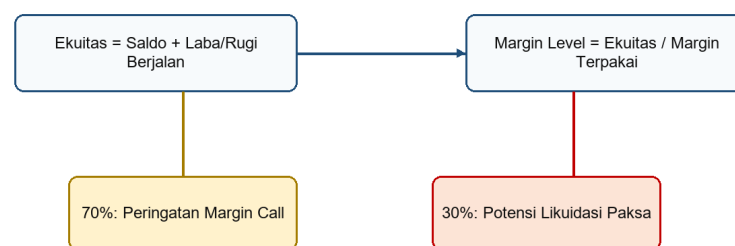
¹²⁷ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹²⁸ "Pengertian Margin Call pada Saham AS Leverage di Pluang," diakses 20 Januari 2026, <https://support.pluang.com/s/article/Pengertian-margin-call-pada-saham-AS-leverage-di-Pluang>.

ditindaklanjuti dengan penambahan dana, posisi pengguna dapat ditutup secara paksa oleh sistem.¹²⁹

Di samping risiko likuidasi, produk *leverage* pada umumnya juga memuat biaya pendanaan, baik harian maupun pada saat tertentu. Pluang menyebut adanya biaya *leverage* harian yang dikenakan setelah pasar ditutup apabila pengguna menahan posisi *leverage* melewati jam tutup bursa. Biaya ini dapat dikenakan setiap hari, termasuk akhir pekan. Dengan demikian, dari sisi ekonomi, produk *leverage*¹³⁰

Skema Perhitungan Ekuitas dan Margin



Gambar 3.7. Skema Perhitungan Ekuitas dan *Margin* pada Posisi Berjalan

Dalam praktik perdagangan derivatif global, regulator sering menekankan bahwa produk ber-*leverage* adalah produk kompleks dan berisiko tinggi. Organisasi internasional regulator pasar modal juga mengidentifikasi berbagai risiko pada produk *over-the-counter*

¹²⁹ “Pengertian Margin Call pada Saham AS Leverage di Pluang,” diakses 20 Januari 2026, <https://support.pluang.com/s/article/Pengertian-margin-call-pada-saham-AS-leverage-di-Pluang>.

¹³⁰ PT PG Berjangka, “Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules,” diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

G. Saham Pecahan (*Fractional Shares*) pada Skema PALN

Salah satu fitur yang menonjol pada layanan Saham AS di aplikasi adalah kemampuan membeli saham pecahan. Materi bantuan Pluang menjelaskan bahwa pengguna dapat membeli saham pecahan tanpa *margin* atau *leverage*¹³¹

Dalam aspek teknis, saham pecahan dapat dipahami sebagai pembukuan atas satuan kepemilikan yang lebih kecil. Namun, mekanisme pembukuan dapat berbeda. Pada sebagian *broker*, pecahan saham dapat dibukukan sebagai kepentingan ekonomis yang diadministrasikan oleh *broker*. Oleh sebab itu, pada penelitian ini, saham pecahan tidak hanya dipahami sebagai ukuran kuantitas, tetapi juga sebagai indikator bentuk kepemilikan. Jika kepemilikan pecahan tidak dicatat atas nama pengguna pada kustodian luar negeri, maka hubungan pengguna terhadap aset dasar lebih tepat dibaca sebagai hak manfaat atau hak tagih ekonomi.

Pluang menjelaskan ketentuan dividen dengan membedakan antara saham tanpa *leverage* dan saham dengan *leverage*. Untuk saham tanpa *leverage*, Pluang menyebut pengguna menerima dividen apabila dividen bersih yang diterima lebih dari jumlah tertentu. Untuk saham dengan *leverage*¹³²

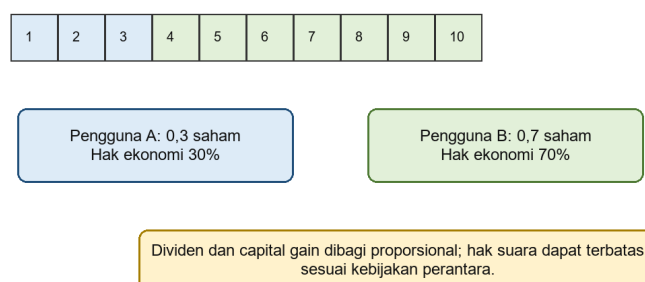
Materi bantuan Pluang juga menjelaskan istilah tanggal dividen seperti *cum date*, *ex date*, dan *record date*. Informasi ini penting karena menegaskan adanya kesesuaian terminologi dengan praktik pasar saham. Pada sisi lain, materi bantuan menegaskan bahwa bila pengguna membeli setelah *cum date*, pengguna

¹³¹ "Pluang US Stocks - Invest in Apple, Tesla & Google | Pluang," diakses 22 Desember 2025, <https://pluang.com/en/produk/pluang-us-stocks>.

¹³² PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

tidak berhak atas dividen. Atas dasar itu, dalam layanan yang menawarkan saham pecahan, hak dividen tetap mengikuti logika tanggal acuan yang berlaku pada emiten.¹³³

Ilustrasi Saham Pecahan dan Pembagian Hak Ekonomi



Gambar 3.8. Ilustrasi Pecahan Saham dan Pembagian Hak Ekonomi

Regulator di Amerika Serikat juga mengingatkan bahwa pecahan saham dapat memiliki keterbatasan, termasuk keterbatasan pemindahan, keterbatasan hak suara, serta cara *broker* mengelola pecahan tersebut. Peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan praktik Pluang. Peringatan ini digunakan untuk menguatkan alasan penelitian bahwa pecahan saham perlu dipetakan secara rinci sebelum penilaian hukum. Dengan kata lain, keberadaan saham pecahan tidak otomatis membuktikan kepemilikan langsung. Ia hanya membuktikan bahwa pengguna mendapat akses terhadap pecahan nilai ekonomi suatu saham.

¹³³ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

H. Struktur Biaya, Pajak, dan Komponen Pendanaan *Margin*

Struktur biaya merupakan bagian yang menentukan bagi pengguna karena biaya mempengaruhi hasil bersih dan menentukan tingkat risiko. Dalam konteks penelitian hukum ekonomi *syariah*, struktur biaya juga menjadi indikator untuk menilai apakah suatu transaksi memuat unsur yang dilarang. Oleh sebab itu, pemetaan biaya pada BAB III diarahkan pada dua aspek. Pertama, jenis biaya dan kapan dikenakan. Kedua, sumber penjelasan biaya, apakah bersumber dari dokumen resmi, materi bantuan, atau informasi pada halaman konfirmasi order.¹³⁴

Pluang menjelaskan adanya perubahan kebijakan biaya transaksi Saham AS pada periode tertentu. Dalam salah satu artikelnya, Pluang menyebut bahwa mulai 15 Juni 2023 setiap transaksi Saham AS dikenakan biaya komisi sampai dengan 0,30 persen dan sudah termasuk PPN. Pluang juga mengaitkan biaya tersebut dengan biaya pelaporan ke JFX dan biaya operasional lainnya. Informasi ini berguna sebagai dasar untuk menginventaris komponen biaya transaksi yang bersifat komisi.¹³⁵

Pada artikel lain, Pluang menjelaskan bahwa transaksi Saham AS dan ETF tidak dikenakan *spread*, serta harga mengacu pada bursa NASDAQ dan NYSE. Pernyataan ini perlu dicatat karena menyangkut transparansi harga. Dalam praktik perdagangan, *spread* dapat menjadi biaya implisit yang tidak selalu terlihat. Jika suatu platform meniadakan *spread*, *klaim tersebut harus dapat diuji dengan*

¹³⁴ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹³⁵ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

*membandingkan harga eksekusi dan harga pasar acuan pada waktu yang sama.*¹³⁶

Untuk produk Saham AS dengan *leverage*, Pluang menjelaskan adanya biaya transaksi dan biaya *leverage* harian. Dalam artikel biaya *leverage*, Pluang menguraikan besaran biaya transaksi untuk pengguna tertentu dan mengaitkannya dengan biaya pelaporan ke bursa berjangka di Indonesia. Pluang juga menyebut adanya biaya harian setelah pasar tutup bila posisi ditahan. Dengan demikian, biaya produk *leverage*¹³⁷

Pada aspek pajak dividen, Pluang menjelaskan adanya pemotongan pajak yang berbeda antara saham tanpa *leverage* dan saham dengan *leverage*. Pluang menyebut pemotongan 15 persen untuk saham tanpa *leverage* dan 30 persen untuk saham *leverage*¹³⁸

Tabel 3.2. Ringkasan Biaya dan Sumbernya pada Layanan Saham AS

Komponen	Mode Tanpa Leverage	Mode Leverage/CFD	Implikasi Syariah
Komisi transaksi	Biaya jasa/layanan	Biaya transaksi	Ujrah bila objek jasa dan besarnya jelas
Spread/harga acuan	Perlu transparansi harga acuan	Perlu transparansi pembentukan harga	Gharar muncul bila harga tidak dapat diverifikasi
Pajak dividen	Dapat berlaku atas dividen bersih	Dapat berbeda sesuai struktur produk	Wajib jelas, tetapi tidak otomatis menentukan halal-haram
Biaya	Tidak relevan	Dapat muncul	Berpotensi riba bila

¹³⁶ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹³⁷ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>. Lihat juga "Pengertian Margin Call pada Saham AS Leverage di Pluang," diakses 20 Januari 2026, <https://support.pluang.com/s/article/Pengertian-margin-call-pada-saham-AS-leverage-di-Pluang>.

¹³⁸ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

Komponen	Mode Tanpa Leverage	Mode Leverage/CFD	Implikasi Syariah
leverage/overnight		harian berbasis waktu	terkait dana talangan/qardh
Margin call/likuidasi	Tidak relevan	Ada pada posisi margin	Berisiko gharar/zalim bila trigger dan biaya tidak terang

Ilustrasi Elemen Informasi pada Layar Order dan Posisi

Aset	Order	Konfirmasi	Posisi
Nama saham	Beli/Jual	Komisi	Kuantitas
Harga acuan	Jumlah	Pajak/fee	Harga rata-rata
Mode transaksi	Jenis order	Total estimasi	Laba/rugi berjalan

Gambar 3.9. Contoh Tampilan Rincian Biaya pada Halaman Order dan Halaman Posisi

Sebagai penutup bagian ini, dapat ditegaskan bahwa struktur biaya dan risiko pada layanan Saham AS Pluang terbagi pada dua model operasi. Pada model tanpa *leverage*, biaya terutama bersifat komisi dan potensi pajak atas dividen. Pada model dengan *leverage*, biaya mencakup komisi transaksi dan biaya pendanaan yang dapat muncul harian, serta risiko *margin call* dan likuidasi paksa. Pemetaan ini menjadi landasan untuk bab analisis. Pada tahap analisis, isu yang diperiksa tidak hanya pada besar biaya, tetapi juga pada hubungan hukum yang

melahirkan biaya tersebut, serta pada karakter ketidakpastian dan potensi spekulasi yang timbul dalam transaksi.¹³⁹

I. Ilustrasi Perhitungan Transaksi pada Kedua Mode

Untuk memperjelas perbedaan kedua mode, bagian ini menyajikan ilustrasi perhitungan sederhana. Angka yang dipakai adalah angka pembulatan untuk memudahkan pembacaan, bukan kutipan tarif resmi. Ilustrasi disusun dari ketentuan umum yang termuat dalam dokumen layanan sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya.¹⁴⁰

Pada mode tanpa *leverage*, misalkan pengguna menyetor Rp1.600.000 dan dikonversi menjadi 100 dolar AS dengan kurs Rp16.000. Dengan dana itu pengguna membeli saham sebuah emiten yang harganya 400 dolar per lembar, sehingga ia memperoleh 0,25 lembar saham pecahan. Seluruh dana pengguna berubah menjadi bagian saham. Tidak ada dana pinjaman dan tidak ada kewajiban yang tersisa setelah transaksi selesai.

Apabila harga naik menjadi 440 dolar, nilai kepemilikan pengguna menjadi 110 dolar. Apabila harga turun menjadi 360 dolar, nilai kepemilikan menyusut menjadi 90 dolar, tetapi pengguna tetap memegang 0,25 lembar saham dan dapat menunggu harga membaik. Kerugian bersifat potensial dan melekat pada naik turunnya nilai aset, sebagaimana watak penyertaan modal pada umumnya.

¹³⁹ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

¹⁴⁰ PT PG Berjangka, "Syarat dan Ketentuan US Stocks Trading Rules," diakses 20 Januari 2026, <https://pluang.com/tnc/us-stock-futures-trading-rules>.

Pengaruh kurs juga perlu diperhitungkan pada kedua arah. Ketika pengguna menjual sahamnya dan menarik dananya ke rupiah, hasil akhirnya ditentukan oleh dua hal sekaligus, yaitu pergerakan harga saham dan pergerakan kurs dolar terhadap rupiah. Kenaikan harga saham dapat berkurang artinya apabila kurs melemah, dan sebaliknya. Risiko kurs ini melekat pada semua investasi lintas mata uang dan bukan merupakan cacat syariah, tetapi wajib diberitahukan secara terbuka agar pengguna menimbanginya sejak awal.

Pada mode *leverage* dengan pengganda lima kali, setoran 100 dolar yang sama memberi pengguna eksposur senilai 500 dolar, setara 1,25 lembar saham pada harga 400 dolar. Pergerakan harga sebesar sepuluh persen mengubah nilai posisi sebesar 50 dolar, yang berarti lima puluh persen dari setoran pengguna. Kenaikan kecil menghasilkan untung besar, dan penurunan kecil menghapus separuh setoran.

Selama posisi dibiarkan menginap, pengguna dikenai biaya pendanaan harian atas nilai eksposur yang dibiayai pialang. Misalkan tarifnya 0,03 persen per hari dari 400 dolar dana talangan, maka biaya per hari sekitar 0,12 dolar. Dalam tiga puluh hari biaya itu menjadi sekitar 3,6 dolar, atau hampir empat persen dari setoran, tanpa memperhitungkan pergerakan harga sama sekali. Biaya ini berjalan terus dan menggerus ekuitas pengguna dari waktu ke waktu.

Apabila kerugian membuat ekuitas jatuh di bawah ambang *margin* minimum, sistem menerbitkan peringatan *margin*. Jika pengguna tidak menambah setoran, sistem menutup posisi secara paksa. Pada contoh di atas, penurunan harga sekitar enam belas persen sudah cukup membuat ekuitas menipis mendekati

ambang penutupan paksa. Pengguna dapat kehilangan hampir seluruh setoran dalam satu gelombang penurunan harga yang wajar terjadi di pasar.

Ilustrasi ini menandakan bahwa perbedaan kedua mode bukan hanya besaran risiko. Pada mode tanpa *leverage*, pengguna menukar uang dengan bagian aset dan menanggung risiko sebagai pemilik. Pada mode *leverage*, pengguna menyetor jaminan untuk bertaruh atas selisih harga sambil membayar biaya pendanaan harian. Struktur yang berbeda inilah yang dinilai secara syariah pada Bab IV.

J. Perbandingan dengan Perdagangan Saham melalui Bursa Efek Indonesia

Sebagai pembanding, mekanisme perdagangan saham dalam negeri memberikan gambaran tentang rantai kepemilikan yang lebih pendek. Investor bursa efek Indonesia membuka rekening efek pada perusahaan sekuritas, memperoleh nomor tunggal identitas investor, dan dananya tersimpan pada rekening dana nasabah atas nama investor sendiri. Saham yang dibeli tercatat pada subrekening efek atas nama investor di lembaga penyimpanan dan penyelesaian.¹⁴¹

Dengan struktur itu, investor dalam negeri dapat memeriksa langsung kepemilikan sahamnya melalui fasilitas yang disediakan lembaga penyimpanan. Kepemilikan bersifat langsung dan mudah dibuktikan. Kondisi ini berbeda dengan skema PALN yang menempatkan beberapa lapis kustodian asing antara pengguna

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 55-56.

dan saham, sehingga pembuktian kepemilikan bergantung pada dokumen dan keterangan penyelenggara.

Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan skema lintas negara, sebab akses langsung ke bursa asing memang menuntut struktur yang lebih panjang. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa semakin panjang rantai perantara, semakin besar kebutuhan atas transparansi dan pembuktian. Standar kepatuhan syariah untuk layanan lintas negara semestinya memerlukan keterbukaan yang setara dengan yang tersedia pada pasar dalam negeri.

Dari sisi fikih, perbandingan ini juga menegaskan arah rekomendasi penelitian. Apabila teknologi memungkinkan pencatatan kepemilikan yang rapi hingga tingkat investor pada pasar dalam negeri, tuntutan yang sama wajar diarahkan kepada penyelenggara layanan saham asing sebagai syarat kepatuhan, khususnya untuk memastikan *qabdh hukmi* benar-benar terjadi.

Sebagai pembanding, pasar modal dalam negeri sudah mempunyai sistem perdagangan daring syariah yang dibangun atas dasar fatwa tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. Pada sistem itu, efek yang diperdagangkan hanya yang masuk daftar efek syariah, fasilitas *margin* berbunga ditiadakan, dan jual kosong tidak dapat dilakukan. Artinya, teknologi perdagangan bisa disesuaikan dengan ketentuan syariah kalau penyelenggaranya mau. Penyesuaian serupa semestinya juga dapat dilakukan pada layanan saham lintas negara. ¹⁴²

¹⁴² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (Jakarta: DSN-MUI, 2011), 9-12.